

PERAN BANK SENTRAL DALAM MENGATUR STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL

Oleh:

Nafajah¹

Nurul Hasanah²

Syifa Aulia Khairunnisa³

Rasidah Novitasari M. E⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec.
Serang, Kota Serang, Banten (42118).

Korespondensi Penulis: 221410153.nafajah@uinbanten.ac.id

Abstract. *Central banks have a very vital role in maintaining the stability of the financial system, especially in the era of the digital economy marked by technological innovations such as fintech, cryptocurrency, and digital payment methods. This study aims to analyze the role of central banks in facing new challenges arising from digital disruption, including risks to financial stability, and assess the effectiveness of implemented policies. By applying a normative legal approach and secondary data analysis, this study explores monetary policy, payment system regulations, and related frameworks such as the Indonesian Payment System Blueprint 2025. The research findings show that strengthening collaboration between stakeholders, developing secure digital infrastructure, and increasing cyber supervision capacity are essential to maintaining financial stability. Success in maintaining the stability of the digital financial system requires a holistic approach that includes strengthening policies, technological oversight, and public education to mitigate risks. The policy recommendations presented are expected to improve the central bank's adaptability in facing the complexity of the digital financial system in the future.*

Keywords: *Central Bank, Financial Stability, Digital Economy, Payment Systems, Cybersecurity.*

Received November 04, 2024; Revised November 11, 2024; November 13, 2024

*Corresponding author: 221410153.nafajah@uinbanten.ac.id

PERAN BANK SENTRAL DALAM MENGATUR STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL

Abstrak. Bank sentral memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga kestabilan sistem keuangan, terutama di era ekonomi digital yang ditandai oleh inovasi teknologi seperti fintech, cryptocurrency, dan metode pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan bank sentral dalam menghadapi tantangan baru yang timbul akibat disrupsi digital, termasuk risiko terhadap stabilitas keuangan, serta menilai efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif dan analisis data sekunder, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan moneter, regulasi sistem pembayaran, serta kerangka kerja yang berkaitan seperti Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi antara para pemangku kepentingan, pengembangan infrastruktur digital yang aman, dan peningkatan kapasitas pengawasan siber sangat penting untuk mempertahankan stabilitas keuangan. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan digital memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kebijakan, pengawasan teknologi, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi risiko. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi bank sentral dalam menghadapi kompleksitas sistem keuangan digital di masa mendatang.

Kata Kunci: Bank Sentral, Stabilitas Keuangan, Ekonomi Digital, Sistem Pembayaran, Keamanan Siber.

LATAR BELAKANG

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan bank sentral untuk mencapai tujuan stabilitas harga dan sistem keuangan yang baik. Dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan biaya pinjaman, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, tingkat pengangguran, dan nilai tukar mata uang. Selain itu, kebijakan moneter juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Melalui kebijakan moneter yang tepat, bank sentral dapat mencegah terjadinya krisis keuangan dan memastikan sistem pembayaran berjalan dengan lancar.

Bank sentral merupakan lembaga keuangan yang berperan sentral dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Sebagai otoritas moneter tertinggi, bank sentral memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan Kebijakan moneter yang dirancang untuk mengendalikan tingkat inflasi, menjaga kestabilan nilai mata uang, dan

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping itu, otoritas moneter, seperti bank sentral, juga berperan dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran yang efisien dan aman, serta melakukan pengawasan terhadap perbankan untuk memastikan kesehatan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Melalui berbagai instrumen kebijakan seperti instrumen pasar terbuka, operasi diskonto, ketentuan cadangan wajib minimum, dan suku bunga acuan bank sentral berupaya mencapai tujuan-tujuan tersebut dan menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem keuangan merupakan sebuah struktur dalam perekonomian suatu negara yang menjalankan berbagai aktivitas layanan keuangan melalui lembaga-lembaga keuangan. Fungsi utama dari sistem ini adalah mentransfer dana dari pihak yang memiliki surplus seperti penabung, kepada pihak yang membutuhkan dana, yang kemudian digunakan untuk konsumsi barang dan jasa serta investasi. Proses ini mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, sistem keuangan memiliki kedudukan yang esensial dalam menopang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini berfungsi sebagai jaringan yang mengintegrasikan berbagai lembaga dan pasar guna mengatur aliran dana dalam perekonomian. Sebagai salah satu elemen kunci dari jaringan ini, sistem pembayaran memainkan peran strategis dalam memperluas akses keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Sistem keuangan adalah jaringan yang menghubungkan berbagai lembaga dan pasar untuk mengelola aliran dana dalam perekonomian. Sistem pembayaran, sebagai bagian penting dari jaringan ini, berperan krusial dalam mendorong inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi semakin krusial. Kemajuan teknologi digital yang terjadi dengan cepat telah merevolusi struktur dan dinamika ekonomi secara fundamental, termasuk dalam sektor keuangan. Munculnya berbagai inovasi finansial berbasis teknologi, seperti fintech, cryptocurrency, dan pembayaran digital, telah memberikan kemudahan dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, disrupsi digital ini juga membawa tantangan baru bagi stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan di era ekonomi digital membutuhkan kolaborasi yang kuat antara bank sentral, regulator sektor keuangan,

PERAN BANK SENTRAL DALAM MENGATUR STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL

pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama yang efektif diperlukan untuk berbagi informasi, mengembangkan standar bersama, dan merumuskan kebijakan yang sinergis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan inovasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan baru yang dihadapi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter dan pengawasan perbankan di era digital, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di masa depan, termasuk dalam menghadapi risiko-risiko sistemik yang muncul akibat interkoneksi yang semakin kompleks dalam sistem keuangan digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka kebijakan moneter dan pengawasan perbankan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik membuat artikel ini dengan judul: "**Peran Bank Sentral dalam Mengatur Stabilitas Sistem Keuangan di Era Ekonomi Digital**".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, ialah jenis metodologi penelitian hukum yang berpusat pada penelitian terhadap data sekunder atau bahan pustaka. Metode ini mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian ini menggunakan data kualitatif dari sumber data sekunder dan bersifat deskriptif analitis. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Bank Indonesia, Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dan kebijakan, peraturan, dan surat edaran lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran Indonesia merupakan beberapa sumber hukum yang dikaji. Tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data, dan metode analisis kualitatif digunakan untuk analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Indonesia dalam Mekanisme Pembayaran

Satu diantara tanggung jawab utama Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral yaitu mengawasi dan mempertahankan kelancaran teknik pembayaran yang selaras berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Memperbesar, meningkatkan, serta mengurus transaksi setoran serta pemrosesan dari bank ke bank lain adalah bagian dari upaya ini. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, mengontrol bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, mengeluarkan lisensi dan izin, dan mengawasi sistem pembayaran. Menurut Bank Indonesia (2022), BI memainkan fungsi berikut ini dalam sistem pembayaran:

1. Mengatur dan Mendorong Pembangunan

Bank Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam mengatur dan memfasilitasi sistem pembayaran. Sebagai regulator, tugas BI adalah memastikan sistem pembayaran beroperasi dengan lancar dengan mengeluarkan peraturan, spesifikasi, dan hukuman yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan jasa keuangan. Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan, BI mengawasi sejumlah standar yang berkaitan dengan pemakaian metode pembayaran, termasuk transfer bank, kredit card, dan barkode atau qris. Regulasi Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018, yang mengatur penggunaan uang elektronik, adalah satu diantara contohnya. Selain itu, BI juga berperan sebagai mediator, yang secara aktif meningkatkan sistem pembayaran untuk memastikan kelancaran transaksi.

2. Mengeluarkan Izin Usaha

Pemberian izin kepada pelaku usaha yang ingin menawarkan jasa atau barang keuangan merupakan salah satu tanggung jawab utama BI dalam sistem pembayaran. Sebagaimana dinyatakan dalam PBI No. 23/6/PBI/2021 dan PBI No. 23/7/PBI/2021, izin ini diberikan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini sejalan dengan misi BI untuk menjaga kelancaran perekonomian Indonesia. Sebabnya, menjadi hal yang krusial dalam memastikan bahawasannya pihak yang bersangkutan telah mendapatkan

PERAN BANK SENTRAL DALAM MENGATUR STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL

persetujuan dari Bank Indonesia sebelum mempercayakan uang atau bisnisnya kepada penyedia layanan keuangan.

3. Perannya sebagai Pengatur

Fungsi penting lainnya dari Bank Indonesia adalah melindungi hak-hak dan tanggung jawab masyarakat dalam kegiatan ekonomi. BI bertanggung jawab untuk mengawasi sistem pembayaran di Indonesia, dengan mewajibkan operator mekanisme pembayaran melalui bank ataupun fintech, untuk menyerahkan catatan tentang operasi mereka. Monitoring ini bertujuan untuk menjaga bank, bisnis, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Salah satunya adalah pengawasan sistem QRIS, yang dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas Finansial serta memperkuat kepercayaan publik pada mekanisme pembayaran.

4. Selain itu, Bank Indonesia juga berkontribusi dalam mengurangi risiko gagal bayar yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Perlambatan ekonomi dapat diakibatkan oleh gagal bayar yang dapat berdampak luas. Untuk mencegah hal ini, BI terus menciptakan strategi pengurangan risiko. Salah satu strategi tersebut adalah Real Time Gross Settlement (RTGS), yang bertujuan untuk mengoptimalkan kecepatan serta keamanan transaksi pembayaran secara real-time.

5. Sebagai Penyelenggara Sistem Pembayaran: Sebelumnya, Pos Indonesia bertanggung jawab atas sistem pembayaran, tetapi sekarang Bank Indonesia bertanggung jawab penuh atasnya. Seiring dengan peningkatan jumlah transaksi digital dan tunai, peran BI sebagai penyelenggara sistem pembayaran menjadi semakin penting. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah dua sistem utama yang diawasi oleh Biro Keuangan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan di Indonesia berjalan dengan lancar. Melalui berbagai fungsinya, Bank Indonesia berusaha mempromosikan pertumbuhan ekonomi negara dengan menyediakan sistem pembayaran yang stabil, efisien, dan aman.

Pengaturan Sistem Pembayaran Digital Di Indonesia

Enam komponen utama diidentifikasi sebagai penghambat dan tantangan dalam pengembangan pembayaran nontunai di Indonesia, menurut sebuah studi mengenai kemajuan pembayaran nontunai di negara tersebut. Ini termasuk penerimaan pengguna, masalah keamanan, ketersediaan infrastruktur, faktor sosial dan budaya, kenyamanan penggunaan, dan preferensi pengguna (Widyastuti, 2017: 41).

Salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam penerimaan pengguna adalah sikap nasabah atau konsumen terhadap sistem pembayaran nontunai tertentu. Meskipun analisis volume transaksi nontunai menunjukkan bahwa masalah ini tidak lagi menjadi masalah yang signifikan, pemerintah harus terus mengawasi masalah keamanan transaksi dan ketersediaan infrastruktur pembayaran. Aspek-aspek tersebut harus diperhatikan. Kemungkinan penyalahgunaan akun adalah salah satu masalah utama dalam keamanan. Selain itu, aspek ketersediaan infrastruktur, stabilitas, dan kecepatan jaringan internet, ketersediaan sistem, dan kecepatan proses transaksi adalah masalah yang sering muncul dalam hal ketersediaan infrastruktur.

Bank Indonesia membuat kebijakan sistem pembayaran Indonesia, yang diluncurkan, karena mereka menyadari betapa pentingnya regulasi untuk sistem pembayaran ini. Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung transaksi tanpa uang tunai. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Selain itu, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Regulasi ini akan berlaku pada 1 Juli 2021 (beritasatu.com id, 8 Januari 2021). Bank Indonesia berencana untuk melanjutkan kebijakan tersebut dengan mengembangkan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci untuk setiap industri sejak penerbitan PBI ini hingga Juli 2021. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan reformasi peraturan. Reformasi ini adalah upaya BI untuk menyeimbangkan inovasi, stabilitas, dan kepentingan nasional. Untuk mengikuti perkembangan ekonomi keuangan digital, struktur industri dirancang dan ekosistem sistem pembayaran dibangun secara menyeluruh. Peraturan ini adalah bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang diungkapkan dalam Kompas pada 18 Januari 2021. Diharapkan bahwa BSPI 2025 dapat memberikan panduan yang jelas terkait pagedaran

PERAN BANK SENTRAL DALAM MENGATUR STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL

uang, pengelolaan moneter, serta stabilitas sistem keuangan. BSPI mengusung lima visi, yaitu:

- 1) Mendukung integrasi ekonomi digital nasional untuk memperkuat fungsi bank sentral.
- 2) Mendorong digitalisasi perbankan melalui open banking dan pemanfaatan teknologi digital serta data dalam sektor keuangan.
- 3) Menjamin keterhubungan antara fintech dan perbankan untuk mengurangi risiko shadow banking melalui regulasi teknologi yang tepat.
- 4) Menyediakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, menjaga integritas, stabilitas, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat.
- 5) Memastikan kepentingan nasional dalam ekonomi dan keuangan digital antarnegara dengan tetap mengedepankan prinsip resiprokalitas.

Baik BI akan melakukan inisiatif sendiri atau bekerja sama dengan otoritas dan industri terkait untuk mewujudkan kelima visi BSPI 2025. Dengan BSPI 2025, diharapkan inovasi digital dapat memberikan akses yang berkelanjutan ke ekonomi dan keuangan formal bagi 62,9 juta UMKM dan 83,1 juta orang yang tidak memiliki rekening bank. Pada akhirnya, situasi ini akan membantu mencapai pemerataan ekonomi (bi. co. id, 20 Januari 2021). PBI Sistem Pembayaran adalah salah satu konkretisasi dari visi BSPI 2025; itu akan membangun struktur industri sistem pembayaran domestik melalui payung hukumnya. Regulasi terkait yang diperkuat oleh aturan ini adalah sebagai berikut: peraturan akses untuk penyelenggaraan sistem pembayaran; pengoperasian sistem pembayaran; pengelolaan data yang komprehensif; dan peran BI dalam sistem pembayaran (keuangankontan. co. id, 20 Januari 2021). Komponen Sistem Pembayaran ini terdiri dari Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PISP), serta mekanisme, infrastruktur, kelembagaan, sumber dana, dan akses ke sumber dana. Dengan reformasi dan restrukturisasi sistem pembayaran, diharapkan integritas dan stabilitas di setiap bagian sistem pembayaran nontunai. Selain pemerintah, ada lembaga lain yang mengelola sistem pembayaran nontunai. Saat ini, banyak lembaga yang mengelola sistem pembayaran telah berkembang menjadi industri tersendiri. Selain itu, pelaku sistem pembayaran telah membentuk kelompok, salah satunya adalah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

ASPI bertujuan untuk meningkatkan fungsi pelaku sistem pembayaran di Indonesia dan menciptakan peraturan mikro dan teknis untuk menjalankan sistem pembayaran. Sementara itu, Bank Indonesia tetap bertanggung jawab atas aturan makro. Sejak 2017, sistem pembayaran nontunai telah berkembang pesat. Dengan perkembangan ini, sistem pembayaran nontunai harus diatur lebih lanjut untuk memberikan pedoman yang jelas tentang kebijakan moneter, pengedaran uang, dan stabilitas sistem keuangan melalui manajemen risiko, terutama di sektor perbankan. "Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital" (BPSI 2025), Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) memberikan payung hukum untuk sistem pembayaran. Selain itu, DPR RI, melalui komisi terkait, harus memastikan sistem pembayaran berjalan dengan baik dan melindungi pengguna.

Tantangan Yang Dihadapi Bank Sentral Dalam Ekonomi Digital

Cybersecurity atau keamanan siber menjadi tantangan utama bagi bank sentral di era digital. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital dan transaksi keuangan yang semakin terintegrasi secara online, risiko serangan siber pun semakin meningkat. Keamanan siber dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas, proses, kemampuan, atau kondisi yang bertujuan untuk melindungi sistem informasi dan komunikasi, beserta informasi yang dikandungnya, dari ancaman berupa kerusakan, penggunaan atau modifikasi tanpa izin, maupun eksploitasi.

Keamanan siber memiliki peran yang krusial dalam melindungi berbagai jenis data dari ancaman pencurian dan kerusakan, termasuk data sensitif dan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi. Peningkatan keterhubungan dan ketergantungan pada layanan berbasis cloud telah memperbesar risiko pelanggaran data dan serangan siber. Ancaman ini tidak hanya menargetkan perusahaan besar, tetapi juga mencakup usaha kecil dan individu. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah keamanan siber yang menyeluruh serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran menjadi esensial dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Pemerintah di berbagai negara telah menyadari urgensi ancaman kejahatan siber dan mengambil tindakan untuk menanganinya. Sebagai contoh, General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa dirancang untuk melindungi privasi data individu, sementara di Amerika Serikat, negara bagian California telah memberlakukan undang-undang terkait pengungkapan

PERAN BANK SENTRAL DALAM MENGATUR STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL

pelanggaran data guna memastikan bahwa individu yang terdampak diberi tahu secara tepat waktu jika terjadi pelanggaran.

Sebagai kesimpulan, keamanan siber merupakan elemen yang sangat signifikan dalam era digital saat ini, khususnya dalam melindungi data, menjaga privasi, dan memastikan kelangsungan operasional layanan-layanan vital. Meningkatnya keterhubungan global dan ketergantungan pada teknologi modern menegaskan pentingnya penerapan langkah-langkah keamanan siber yang tangguh serta kewaspadaan berkelanjutan untuk secara efektif menghadapi ancaman siber.

Terdapat beberapa jenis ancaman keamanan siber yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Denial-of-Service (DoS):**

Serangan ini dimaksudkan untuk mencegah pengguna yang bertanggung jawab mengakses mesin atau sumber daya jaringan. Ini dapat mengakibatkan gangguan operasional hingga kegagalan total dalam melakukan fungsi yang dibutuhkan.

2. **Malware:**

Malware, yang dapat mengakses sistem komputer secara tidak sah melalui perangkat lunak berbahaya, memiliki kemampuan untuk merusak sistem, mencuri informasi, atau mengganggu operasi normal perangkat yang terinfeksi.

3. **Phishing:**

Serangan phishing adalah upaya untuk mendapatkan data pribadi pengguna internet dengan menggunakan teknologi dan teknik rekayasa sosial. Akibatnya, pencurian identitas atau kebocoran data pribadi dapat terjadi.

4. **SQL Injection:**

Serangan ini dilakukan dengan memasukkan string input berbahaya ke dalam aplikasi, yang memungkinkan pencurian data sensitif atau bahkan kerusakan pada struktur basis data.

5. **Man-in-the-MiddleAttacks:**

Ketika pihak ketiga yang tidak berwenang memasuki komunikasi antara dua pihak yang sah, serangan ini dapat menyebabkan pencurian data atau manipulasi informasi yang dikirim antara kedua pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya bank sentral dalam menjaga sistem keuangan stabil di era ekonomi digital. Bank sentral bertanggung jawab strategis untuk menetapkan kebijakan moneter, mengawasi sistem pembayaran, dan menjaga sistem keuangan aman dari gangguan teknologi. Sementara kemajuan teknologi finansial seperti fintech, cryptocurrency, dan pembayaran digital menghasilkan peningkatan efektivitas, mereka juga menghadirkan tantangan baru, terutama yang berkaitan dengan keamanan siber dan risiko sistemik.

Salah satu contohnya adalah Bank Indonesia, yang telah mengadopsi "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025", yang bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi digital, mendukung digitalisasi perbankan, dan menciptakan ekosistem keuangan yang stabil dan inklusif. Namun, masalah seperti ancaman siber, infrastruktur yang tidak memadai, dan kebutuhan untuk kerja sama antar pemangku kepentingan terus menjadi perhatian utama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan digital memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kebijakan, pengawasan teknologi, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi risiko. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif bagi bank sentral di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Elza Surachman, Syarifah Zuhra, Rasyid Tarmizi, Samuel PD Anantadjaya, Anake Nagari, Retno Dyah Pekerti, Hilda Yuliasuti, Nolchi Yudian Languyu, Rego Devila, Mohammad Annas, Subhi Munir, Dahlia Tri Anggraini, Gilang Sekar Tadjie, Edwin Basmar, Wulan Ayuandiani, Meliana, Sutanti (2024). Menejemen keuangan di era digital. Serang: pt sada kurnia pustaka
- Agustina Widi Palupiningrum, Anggi Mayang Sari.(2024).Strategi transformasi bank indonesia (BI) menuju bank sentral digital.OIKONOMIA: JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND.
- Arfan Dwi Madya,Bagas Djoko Haryanto, Devi Putri Ningsih, Fried Sinlae (2023). Keefektifan Metode Proteksi Data dalam Mengatasi Ancaman Cybersecurity. INDOTECH: Indonesian Journal of Education And Computer Science

PERAN BANK SENTRAL DALAM MENGATUR STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL

Nurul Fadhillah (2024). Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Ekonomi Dan Pertumbuhan Keuangan Di Era Globalisasi.

Rini Puji Astuti, Nabila Syahda Kamila, Nurul Holida, Muzayyanah Agustin (2024). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis

Rita Martini, Resy Agustin, Amira Fairuzdita, Anggun Noval Murinda (2019). Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 25 (2), 69-74,

Venti Eka Satya (2022). Pengaturan Sistem Pembayaran Digital untuk Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. Jakarta: Info Singkat.